

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul.**

Iran dalam tiga dasawarsa ini merupakan negara yang kontroversial. Iran yang dahulu dikenal dengan Persia berubah dari negara aristokrat menjadi negara republik teokrat yang bernama Republik Islam Iran melalui sebuah Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatulloh Khomeini pada tahun 1979.

Semenjak revolusi tersebut, kebijakan Iran selalu mengundang kontroversi, khususnya negara barat. Mulai dari kisah penyanderaan para diplomat Amerika Serikat yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatiknya sampai saat ini, bahkan pada tahun 2002 AS mengecap Iran sebagai negara poros setan. Kemudian fatwa mati Khomeini terhadap Salman Rushdie pengarang Inggris yang membuat hubungan diplomatik antara Iran dan Inggris sempat terputus. Kebijakan Iran ini berlanjut hingga masa kini dibawah Presiden Ahmadinejad yang lebih kontroversial.

Ahmadinejad merupakan presiden Iran yang kontroversial dimana ia sering memberikan pernyataan dan membuat kebijakan yang kontroversial. Pernyataannya yang menyangsikan adanya peristiwa *holocaust* dan berniat menghapuskan Israel dari peta dunia serta kebijakannya yang tetap meneruskan program pengayaan uraniumnya mendapat kecaman, ancaman, serta sanksi keras dari negara-negara Barat seperti AS dan Inggris.

Dalam situasi yang mendapat tekanan serta ancaman perang yang sering dilontarkan pihak Barat, pada tanggal 23 Maret 2007 Iran menangkap 15 tentara Inggris yang bertugas di wilayah perairan Shatt Al-Arab dengan alasan melanggar wilayah

perairan Iran. Wilayah ini merupakan sengketa yang telah berlangsung lama antara Iran dan Irak.

Insiden itu terjadi satu hari menjelang diadakannya pemungutan suara atas keluarnya resolusi 1747 yang berisikan sanksi untuk Iran atas program nuklirnya. Kebijakan Iran ini mempunyai resiko yang cukup besar mengingat eskalasi konflik sedang meninggi sehingga dikhawatirkan perang dapat terjadi.

Namun Iran tetap melanjutkan kebijakannya dengan menahan tentara Inggris itu meskipun pada akhirnya Iran membebaskannya pada tanggal 4 April 2007. Insiden ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena Iran berani mengambil kebijakan yang penuh resiko dengan menahan para tentara Inggris dinilai mempunyai motif dan kepentingan yang tersembunyi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan mengambil judul “ **Kepentingan Iran Pada Insiden Shatt Al-Arab Tahun 2007.**”

## **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi dengan judul : “**Kepentingan Iran Pada Insiden Shatt Al-Arab Tahun 2007**” adalah sebagai berikut:

1. Penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan alasan kebijakan Iran pada insiden perairan Shatt Al-Arab.
2. Penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan strategi Iran dalam menyelesaikan krisis ini serta kepentingan Iran yang ingin dicapai melalui insiden ini.
3. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat selama proses perkuliahan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya dan berkaitan dengan mata kuliah Politik dan Pemerintahan Timur Tengah pada khususnya.

4. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang kesarjanaan strata-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Revolusi Islam Iran 1979 telah merubah sistem pemerintahan dan tata negara Iran, dari sistem dinasti kerajaan menjadi Republik Islam. Perkembangan Revolusi Iran yang terjadi setelah tumbangannya kekuasaan Reza Syah Pahlevi menimbulkan dampak kuat, seperti keinginan menyebarluaskan (ekspor) Revolusi Islam Iran.<sup>1</sup> Perubahan inilah membuat kebijakan-kebijakan politik luar negeri Iran didominasi dengan kebijakan yang bersifat konfrontatif dengan negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Sekutunya, serta Israel.

Wilayah Iran yang berada pada kawasan Timur Tengah, menjadikan Iran rawan dengan konflik, hal ini dapat dipahami karena stabilitas keamanan dan politik di kawasan Timur Tengah sangat tidak menentu. Pada tahun 2003 Irak diinvasi oleh Amerika Serikat dan Sekutunya, yang antara lain Inggris. Dengan hadirnya pasukan Sekutu di wilayah Irak, kestabilan keamanan dalam kawasan timur tengah kembali tidak menentu. Kewaspadaan negara-negara Timur Tengah yang tidak kooperatif dengan Sekutu kian meninggi. Apalagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Irak akan sangat rentan dengan konflik.

Iran termasuk negara yang tidak kooperatif dengan Sekutu, selain itu Iran juga mempunyai perbatasan dengan Irak (1.458 km) di barat dan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Di utara Teluk Persia ini, Iran mempunyai perbatasan dengan Irak

---

<sup>1</sup> Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, Juxtapose, 2003, hal 186

berupa sungai yang disebut Arvand Rud atau Shatt Al-Arab. Sungai ini, merupakan daerah yang telah lama dipersengketakan oleh kedua negara. Pemerintahan Irak di masa kekuasaan Hasan Al-Bakr, berusaha mengubah garis batas negaranya di sungai Arvand dengan melancarkan agresi militer. Namun agresi militer Irak itu gagal dan menelan kekalahan. Setelah kekalahan ini, akhirnya Rezim Irak di saat itu, mengakui bahwa garis perbatasan air Iran dan Irak ditarik dari titik terdalam sungai Arvand Rud. Perbatasan kedua negara di wilayah sungai ini disepakati dalam perjanjian Aljazair pada tahun 1975. Pada zaman rezim Saddam Husein, Irak melanggar perjanjian Aljazair dengan menyerang Iran karena ingin berusaha menguasai sungai ini, meskipun akhirnya gagal.

Pasca Irak diinvasi oleh Amerika Serikat dan Sekutunya, insiden di perairan Shatt Al-Arab kembali terjadi. Kali ini terjadi pada pasukan koalisi dari Inggris yang bertugas mengamankan wilayah Irak di area Shatt Al-Arab. Pada tanggal 23 Maret 2007, 15 pelaut dari kapal korvet HMS Cornwall Inggris ditahan oleh Iran di perairan Teluk.

Peristiwa ini terjadi dekat muara Sungai Arab di perairan utara Teluk, yang kontroversial antara Iran dan Irak, maka sulit dinyatakan apakah pelaut Inggris melanggar kedaulatan. Namun terlepas dari sengketa tersebut, masing-masing pihak mempunyai argumen dan penjelasan tersendiri dalam insiden tersebut. Pemerintah Inggris melalui Kementerian Pertahanan Inggris dalam pernyataan resminya mengatakan, bukti-bukti data satelit menunjukkan bujur dan lintang persis letaknya para pelaut Inggris ketika ditangkap, yaitu 1,7 mil sebelah perairan Irak. Sedangkan Kedutaan Besar Iran untuk Inggris menyatakan, bukti menunjukkan bahwa tentara Inggris telah memasuki 0,5 km perairan Iran ketika ditahan. Pemerintah Iran

melaporkan bahwa kapal ini berada pada titik koordinat 29°51'9" LU dan 48°45'11 BT, titik ini telah melewati sekitar 450 meter dari perbatasan. Menurut Perjanjian Aljazair 1975, titik perbatasan terletak di 29°51'16"LU, 48°44'45" BT, sedangkan di pihak Inggris menggunakan peta Shatt Al-Arab yang diberikan oleh Universitas Durhann, Inggris menyatakan bahwa kapal itu berada pada titik koordinat 29°50.174 LU , 48°43.544' BT yang merupakan wilayah perairan Irak.<sup>2</sup>

Insiden ini meningkatkan ketegangan antara Iran dengan negara-negara Barat, termasuk Inggris. Akibat dari insiden ini Pemerintah Inggris memutuskan membekukan semua hubungan resmi dengan Iran sampai prajurit-prajurit Inggris yang ditahan dibebaskan. Keputusan Inggris ini membuat hubungan Inggris-Iran semakin tegang.

Hubungan Iran dengan negara-negara Barat sudah diwarnai ketegangan sebelumnya melalui isu program nuklir yang dijalankan oleh Iran yang mendapat reaksi keras dari negara-negara Barat. Penangkapan tentara Inggris oleh Iran ini terjadi sehari menjelang pemungutan suara di DK PBB mengenai program nuklir Iran yang dikenal dengan resolusi 1747 pada tanggal 24 Maret 2007, penangkapan tersebut membuat situasi semakin panas karena Inggris merupakan salah satu pendorong keluarnya Resolusi 1747 DK PBB disamping Amerika Serikat (AS) sebagai aktor utama yang menjatuhkan sanksi ekonomi, politik dan militer terhadap Iran.

Pada dasarnya penahanan terhadap pelaut Inggris di wilayah perairan ini bukanlah yang pertama kali oleh Iran. Pada tahun 2004, 8 pelaut Inggris ditahan oleh Iran karena sebab sama di perairan ini. Peristiwa itu diselesaikan setelah 8 pelaut Inggris minta maaf secara terbuka di stasion televisi Iran. Akan tetapi, peristiwa kali ini terjadi di latar belakang yang sama sekali berbeda, dimana pada peristiwa kali ini Iran

---

<sup>2</sup> [www.wikipedia.org/wiki/2007\\_Iranian\\_seizure\\_of\\_Royal\\_Navy\\_personnel](http://www.wikipedia.org/wiki/2007_Iranian_seizure_of_Royal_Navy_personnel) - 280k -

sedang bersitegang dengan negara-negara Barat karena masalah nuklir, dan resolusi baru Dewan Keamanan mengenai sanksi terhadap Iran.

Dua isu dalam waktu yang berdekatan ini menimbulkan spekulasi akan terjadinya perang antara Iran dengan negara-negara barat khususnya Inggris dan AS. Setelah terjadinya peristiwa penahanan ini, Inggris dan AS tidak saja mengecam keras Iran, tapi juga menggunakan kesempatan latihan militer mengirim kapal induk John C. Stennis dan Dwight D. Eisenhower ke Teluk Persia.

Dalam situasi demikian, peristiwa penahanan pelaut Inggris sangat dikhawatirkan akan semakin meningkat, bahkan memicu aksi militer bersama Inggris dan AS terhadap Iran, meskipun dalam pernyataan yang lain pemerintah Inggris mengedepankan penyelesaian dengan langkah diplomatis.

Sedangkan dipihak lain, Iran menyatakan bahwa penahanan atas ke-15 tentara Inggris ini merupakan masalah hukum bukan politis, meskipun banyak pihak menyatakan bahwa Iran menahan pelaut Inggris ini untuk dijadikan tameng politis dalam kasus yang lain (krisis nuklir). Iran menganggap bahwa ke-15 tentara Inggris tersebut telah memasuki wilayah teritorial Iran tanpa izin. Pemerintah Iran juga memandang bahwa penyelesaian masalah ini, hendaknya dapat diselesaikan dengan jalur diplomatis Pemerintah Iran akan membebaskan ke-15 tentara Inggris yang ditahan dengan syarat adanya permintaan maaf resmi dari pemerintah Inggris atas insiden ini dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Bahkan untuk menguatkan alasannya Iran juga merilis video yang memuat pengakuan para pelaut Inggris yang telah melanggar wilayah Iran. Bahkan Faye Turner satu-satunya pelaut wanita yang ditangkap juga mengirimkan surat yang berisikan permintaan maaf karena telah memasuki wilayah Iran secara illegal. Dalam surat itu

juga disinggung mengenai keberadaan pasukan koalisi di Irak yang harus segera ditarik, tentu saja, penayangan video dan surat ini mendapatkan reaksi keras dari pemerintah Inggris. Penyiaran surat dan gambar tentara Inggris itu membuat pernyataan yang bernada kekesalan dari pemerintah Inggris.

Terlepas dari pernyataan-pernyataan tersebut, Pemerintah Inggris, meskipun tidak mengirimkan nota ataupun menyatakan permintaan maaf secara resmi, namun pada dasarnya, pemerintah Inggris ingin menyelesaikan insiden secara diplomatis. Inggris menunjukkan sikap melunak atas penahanan 15 personel Angkatan Laut Kerajaan Inggris oleh Iran. Untuk pertama kalinya Menteri Luar Negeri, Margaret Beckett, memberikan pernyataan yang mengindikasikan bahwa Inggris menyesalkan kejadian tersebut.

*“Pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya pikir semua orang menyayangkan karena masalah itu memanas. Kita ingin keluar dari situasi ini,”* kata Beckett.<sup>3</sup>

Perdana Menteri Inggris Tony Blair memperingatkan Iran, jika tidak selekasnya membebaskan pelaut Inggris, peristiwa akan memasuki tahap lain, namun sementara itu juru bicaranya menjelaskan bahwa apa yang disebut tahap lain tidak berarti Inggris akan mengambil aksi diplomatik ekstrim seperti mengusir diplomat Iran, atau mengambil aksi militer. Ini berarti Inggris tidak berniat mengambil aksi militer. Kedutaan Besar Iran untuk Inggris dalam pernyataannya menyatakan yakin bahwa pemerintah kedua negara mampu menyelesaikan masalah ini melalui kontak dan kerja sama erat, dan menghindari terulang kembali masalah serupa.

---

<sup>3</sup> *Republika Online* 2 April 2007 diakses dari situs [http://www.cmm.or.id/cmm\\_ind\\_more.php?id=A4115\\_0\\_3\\_0\\_M](http://www.cmm.or.id/cmm_ind_more.php?id=A4115_0_3_0_M)

Dengan adanya indikasi-indikasi yang mengarah pada melunaknya sikap Inggris, Pemerintah Iran melalui Presidennya, Mahmoud Ahmadinejad menyatakan pembebasan bagi ke-15 tentara Inggris pada tanggal 4 April 2007. Dalam pernyataan tersebut, pembebasan ini merupakan “hadiah” bagi rakyat Inggris yang merayakan hari Paskah.<sup>4</sup> Terlepas dari pernyataan Presiden Mahmoud Ahmadinejad tersebut, kebijakan Iran dalam menahan ke-15 pelaut Inggris adalah sebuah langkah yang berani dan penuh resiko karena sebelumnya Iran tengah mendapat sorotan dunia atas program nuklirnya. Krisis ini bisa saja memicu perang antara Iran dengan negara Barat khususnya Inggris dan AS. Namun Iran tetap melakukan kebijakannya dengan menahan ke-15 pelaut Inggris meskipun pada akhirnya melepaskannya.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

**” Apa Kepentingan Iran Pada Insiden Shatt Al-Arab Tahun 2007?”**

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan konsep sebagai alat analisis. Menurut K.J. Holsti, konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Kita menggunakannya sehari-hari untuk

---

<sup>4</sup> BBC, diakses dari situs [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)



menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar cirri-cirinya yang relevan bagi kita.<sup>5</sup>

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang paling umum dan paling mendasar yang digunakan dalam pembahasan politik luar negeri suatu negara. Konsep ini sering dipakai juga untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. Dalam tahap operasional, kepentingan nasional yang tercermin dalam politik luar negeri itu ditetapkan dalam berbagai macam teknik yang berbeda. Bentuknya dapat berupa kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam politik internasional atau dengan kata lain, suatu negara akan mempergunakan segalanya untuk mempengaruhi dunia luar demi menjamin kepentingan nasionalnya. Plano memberikan batasan tentang kepentingan nasional sebagai berikut:

*“Kepentingan nasional adalah faktor mendasar dan pokok yang menuntut para pembuat keputusan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara merupakan suatu konsep yang masih umum dan hasil dari berbagai elemen yang merupakan keinginan yang sangat vital. Yang termasuk dalam elemen tersebut adalah mempertahankan diri sendiri, kemerdekaan, integrasi wilayah, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.”<sup>6</sup>*

Para pengambil keputusan akan mempertimbangkan untung rugi dalam menentukan kebijaksanaan. Disamping itu, para pembuat keputusan sebagai aktor yang rasional juga mempertimbangkan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan itu bahwa pengambil keputusan, disadari atau tidak, memiliki pendapat tentang prioritas nilai dan konsepsi tentang sarana-sarana yang dipunyai dan tujuan tersebut.

---

<sup>5</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*, Anggota Ikapi: Jakarta, 1988 hal 170-171.

<sup>6</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton. *The International Relations Dictionary*, (New York Rinehart and Winstone, 1969), hal. 128

Dalam memahami kebijaksanaan politik luar negeri suatu negara tidak bisa dipisahkan dari kepentingan negara yang bersangkutan. Untuk dapat memahami permasalahan ini, konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku luar negeri (Iran) terhadap suatu negara (Inggris).

Untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, suatu negara akan menggunakan kebijaksanaan politik luar negeri, sekalipun berbeda dalam strategi dan tindakannya, tetapi semua sama dalam tujuan, yakni guna mencapai tujuan khusus kepada kepentingan nasional.

Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain melalui jalan konfrontasi maupun kerjasama.<sup>7</sup> Pengendalian yang dimaksud tidak hanya sebatas kemampuan untuk mengendalikan negara lain agar selalu bersikap lunak dan sejalan dengan kehendaknya, akan tetapi pengendalian yang dimaksud mempunyai artian yang lebih luas, yaitu kondisi dimana suatu negara memiliki kemampuan minimum dalam menjaga kelangsungan hidup (survival) di dalam politik internasional.

Kemampuan minimum suatu negara menurut Morgenthau meliputi tiga hal, yaitu;

1. Perlindungan terhadap identitas fisik, yaitu harus mampu mempertahankan integritas teritorialnya.
2. Perlindungan terhadap identitas politik yang berarti harus mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya.

---

<sup>7</sup> Hans J. Morgenthau dalam TA Coulumbis dan JH Wolfe, *Introduction to Internasional Relations* (Prentice Hall hal.163,1986), hal 163

3. Perlindungan terhadap budayanya yang berarti harus mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan suatu negara tidak akan pernah lepas dari keharusan untuk mengamankan wilayah, memajukan kesejahteraan ekonomi dan mempertahankan kultur negara-bangsa.

Konsep kepentingan nasional ini diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan: mengapa Iran menangkap 15 pelaut Inggris yang melewati batas wilayahnya. Berdasarkan permasalahan diatas penangkapan Iran atas 15 pelaut Inggris terjadi karena adanya kepentingan nasional. Iran mempunyai kepentingan nasional terhadap kasus ini, yaitu mempertahankan integritas wilayahnya. Perairan Shatt Al-Arab merupakan wilayah Iran yang berbatasan dengan Irak. Iran mengklaim bahwa kapal Inggris beserta ke 15 awak kapal tersebut telah memasuki 0,5 km ke dalam wilayahnya.

Dalam kasus pelanggaran wilayah oleh kapal HMS Cornwall milik Inggris di perairan Shatt Al-Arab, perlindungan identitas fisik yaitu perairan Shatt Al-Arab dilakukan oleh pemerintah Iran dengan Angkatan Laut Garda Republik Islam Iran sebagai pelaksana untuk melindungi daerah teritorial Iran. Seperti diketahui Shatt Al-Arab merupakan wilayah perairan yang dimiliki oleh dua negara yaitu Iran dan Irak. Irak yang pernah menginvasi perairan ini, sedang dikuasai oleh pasukan koalisi dan diantaranya Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Inggris beserta awaknya ini merupakan tindakan ilegal yang harus ditindak oleh Iran, meskipun kapal ini sedang bertugas untuk mengamankan wilayah ini dari peredaran barang ilegal. Penangkapan kapal dan 15 pelaut Inggris ini, merupakan tindakan peringatan untuk Inggris ataupun

---

<sup>8</sup> Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Terjemahan Kenneth W. Thompson, Third Edition. Alfred A. Knoff, New York, 1963, hal. 141

negara lainnya bahwa Iran bertindak tegas dalam upaya melindungi integritas wilayahnya serta ancaman dari luar yang ingin menyerang Iran khususnya dari Amerika, Inggris, Israel, dan Sekutunya.

Peranan pemerintah Iran, baik itu melalui Presiden Iran ataupun Departemen Luar Negerinya dalam memberikan keterangan-keterangan serta tanggapan terhadap penangkapan kapal Inggris beserta awaknya ini merupakan perlindungan identitas politik. Dalam insiden kali ini, penguasaan terhadap media sangatlah penting, mengingat tanggapan serta keterangan dari masing-masing pihak dalam insiden ini dapat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga sangat mempengaruhi opini publik internasional. Dalam hal ini, penjelasan-penjelasan serta langkah diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah Iran memainkan peranan penting dalam insiden ini.

## **2. Konsep Diplomasi**

The Oxford English Dictionary mendefinisikan diplomasi sebagai berikut. *“The management of international relations by negotiations. The method by which these relations are adjusted and managed.”* Artinya diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil.”<sup>9</sup>

Sedangkan S.L. Roy mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

*“Diplomasi yang erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengijinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya.”*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> S.L. Roy, *Diplomasi*, terjemahan Harwanto Dahlan dan Mirsawati, Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta, hal 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 5

Diakui secara luas bahwa salah satu fungsi utama diplomasi adalah negosiasi.<sup>11</sup> Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses,<sup>12</sup> dengan kata lain diplomasi merupakan sarana dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi pada satu negara dengan negara lainnya, baik itu secara bilateral, multilateral, maupun internasional. Dengan diplomasi diharapkan terjadi kesepakatan bersama antara negara yang berkaitan masalah. Meskipun pada akhirnya jalur diplomasi itu juga sering menemui kegagalan, namun kegagalan-kegagalan itu seringkali juga menjadi alasan bagi para diplomat untuk menyalahkan lawannya di muka internasional.

Menurut Harold Nicholson, kata diplomasi menunjukkan paling tidak lima hal yang berbeda. Dari kelima hal tersebut, empat hal yang pertama menyangkut : (1) politik luar negeri, (2) negosiasi, (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, dan (4) suatu cabang Dinas Luar Negeri. Ia kemudian selanjutnya mengatakan bahwa interpretasi kelima merupakan kualitas abstrak pemberian, yang arti baik mencakup, keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional; dan dalam arti yang buruk mencakup tindakan taktik yang lebih licik.<sup>13</sup>

Secara umum diakui bahwa tujuan diplomasi adalah tercapainya kepentingan nasional suatu negara, untuk itu agar diplomasi berjalan dengan baik, sangat diperlukan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kautilya, pencapaian tujuan diplomatik bisa dilakukan dengan penerapan satu atau kombinasi beberapa prinsip utama instrumen diplomasi, yaitu sama, dana, danda, bedha (perdamaian atau

---

<sup>11</sup> Frankel, *International Relations*, hal 99, dalam S.L.Roy, *Diplomacy*, terjemahan Harwanto Dahlan dan Mirsawati, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 17

<sup>12</sup> S.L.Roy, *Ibid*, hal 17

<sup>13</sup> Harold Nicholson, "*Diplomacy*", London: 1942, dalam S.L.Roy, *Diplomacy*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 3

negosiasi, memberi hadiah atau konsesi, menciptakan perselisihan, menggunakan ancaman/kekuatan nyata)<sup>14</sup>.

Dalam politik internasional masing-masing negara mempunyai kepentingan sendiri. Setiap negara yang ingin mengejar sebuah politik luar negeri secara cerdas selalu membandingkan tujuan mereka sendiri dengan tujuan negara lain dipandang dari sudut kecocokannya. Apabila tidak sejalan/cocok hal tersebut kemudian dipertimbangkan apakah kepentingan tersebut mendasar, kemudian apakah terdapat konsekuensi tertentu apabila dicapai ataupun tidak dicapai. Apabila kepentingan tersebut tidak dicapai tidak akan menimbulkan konsekuensi dan tidak mempengaruhi kepentingan yang mendasar bagi bangsa, suatu negara bisa meninggalkannya. Tetapi apabila kepentingan suatu negara tidak sejalan dengan kepentingan negara lain dan itu vital, maka para pengambil keputusan akan berusaha memecahkan masalah itu dengan “*bargaining take and give*” untuk mencapai kesesuaian.<sup>15</sup>

Pendekatan *take and give* ini lebih menitikberatkan pada adanya penyesuaian-penyesuaian dan konsesi dalam berdiplomasi atau dengan kata lain damai dengan penyesuaian. Namun untuk mencapai diplomasi diperlukan sebuah “*bargaining power*” atau sebuah kekuatan yang bisa dijadikan alat tawar-menawar yang dimiliki oleh setiap negara. Kekuatan ini sangat mendukung keberhasilan sebuah diplomasi, termasuk diplomasi pendekatan “*take and give*”.

*Take and give* ini juga sejalan dengan tipe diplomasi yang menitikberatkan pada *profit-politics*, dalam diplomasi hal ini disebut oleh Nicholson dengan *shop-keeper diplomacy*. Dalam pendekatan ini, suatu kompromi yang memuaskan pada umumnya

---

<sup>14</sup> S.L. Roy, *Ibid*, hal 33

<sup>15</sup> S.L. Roy, *Ibid*, hal 15

lebih menguntungkan daripada penghilangan kubu musuh. Selain itu, negosiasi bukan semata-mata sebuah fase perjuangan hidup mati, tetapi suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai pengertian yang kokoh melalui konsesi yang saling menguntungkan.<sup>16</sup> Meski dalam tipe ini lebih menitikberatkan pada keuntungan-keuntungan ekonomi, namun pendekatan ini juga dapat diterapkan dalam upaya-upaya sebuah negara dalam mendapatkan keuntungan politis.

Konsep diplomasi ini dapat diaplikasikan dalam meneliti masalah dalam insiden penahanan kapal HMS Cornwall milik AL Inggris beserta ke 15 awak kapalnya di perairan Shatt Al-Arab pada tanggal 23 Maret 2007 yang telah melibatkan Iran dan Inggris dalam suatu krisis. Krisis ini dipicu karena insiden ini sarat dengan kepentingan politis dan masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kepentingannya. Selain itu insiden ini terjadi pada saat yang hampir bersamaan dengan krisis nuklir Iran. Iran tengah menghadapi tuntutan penghentian program nuklirnya oleh DK (Dewan Keamanan) PBB yang tertuang dalam Resolusi 1747 yang akan diputuskan pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Maret 2007, resolusi ini dimotori oleh Amerika Serikat dan Sekutunya, termasuk Inggris.

Berbeda dengan diplomasi-diplomasi Iran sebelumnya, dimana Iran lebih bersifat “*defensif*” terkait dengan program nuklirnya dengan berusaha kooperatif dengan lembaga internasional yang mengawasi program nuklirnya, pada krisis ini terlihat Iran lebih “*ofensif*”. Kebijakan Iran dengan menangkap para pelaut Inggris sehari sebelum pemungutan suara di DK PBB menyangkut program nuklirnya dapat dimasukkan dalam instrumen dandha, yaitu menciptakan perselisihan, kemudian

---

<sup>16</sup> S.L. Roy, *Ibid*, hal 55

melakukan negosiasi. Hal inilah yang menjadikan diplomasi Iran lebih “*ofensif*” mengingat kebijakan ini sangat rentan terhadap adanya konflik.

Dalam krisis ini, kebijakan diplomasi Iran berbeda dengan kebijakan diplomasi Inggris. Kebijakan diplomasi Iran lebih pada diplomasi terbuka bilateral, dimana Iran meminta permintaan maaf resmi atas kesalahan pelanggaran wilayah yang dibuat oleh ke-15 pelaut Inggris. Sedangkan dipihak Inggris lebih mengutamakan pendekatan yang bersifat multilateral dan internasional dengan melibatkan Uni Eropa dan PBB untuk menekan kebijakan Iran, walaupun pada akhirnya Inggris melakukan pendekatan secara bilateral dengan Iran.

Meskipun Iran menganggap insiden penahanan ini adalah murni tindakan hukum, namun disaat yang sama Iran sedang mengalami krisis politik sehingga pada awalnya memicu anggapan bahwa Iran menggunakan penyanderaan sebagai alat untuk menekan negara Barat khususnya Inggris agar tidak mengeluarkan sanksi kepada Iran terkait dengan program nuklirnya. Namun, dalam kenyataannya penahanan ini tetap tidak mempunyai efek terhadap keluarnya resolusi 1747 pada tanggal 24 Maret 2007, disisi lain terdapat anggapan bahwa Iran menangkap pelaut Inggris sebagai alat untuk bernegosiasi terkait dengan ditangkapnya 5 warga Iran di Irak oleh pasukan koalisi Sekutu pada 5 Januari 2007.

Selain motif-motif politik tertentu yang bersifat negosiatif dan indikasi-indikasi yang mengarah pada konsesi, melalui penahanan ini Iran dapat mengetahui seberapa keras reaksi dari negara Barat jika terlibat insiden secara langsung, yang dalam hal ini adalah Inggris. Reaksi ini sangat berguna bagi kepentingan diplomasi Iran, mengingat ancaman perang dari Sekutu yang terus dilontarkan terkait, dengan tindakan Iran dalam mengembangkan nuklirnya. Dengan reaksi Inggris yang cenderung lunak dan



mengupayakan penyelesaian secara diplomatik dalam insiden ini serta reaksi Amerika Serikat yang cenderung “*diam*”, potensi ancaman perang yang sering dilontarkan pihak Sekutu kepada Iran berkurang, paling tidak dalam jangka waktu yang dekat..

### **3. Konsep Propaganda**

Terrence Qualter mendefinisikan propaganda sebagai berikut ;

*“Usaha yang disengaja oleh beberapa individu atau kelompok melalui pemakaian instrument komunikasi dengan maksud bahwa pada situasi tertentu reaksi dari mereka yang dipengaruhi adalah seperti yang diinginkan sang propagandis.”*<sup>17</sup>

Sedangkan Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan propaganda sebagai sebuah bentuk komunikasi yang ditujukan untuk menancapkan ide atau imajinasi ke dalam pikiran manusia yang dipacu untuk mempengaruhi pemikiran, emosi, serta tindakan individu atau kelompok.

Selain itu menurut mereka tujuan propaganda mencakup;<sup>18</sup>

1. memperoleh atau memperkuat dukungan rakyat dan negara sahabat.
2. mempertajam atau mengubah sikap serta cara pandang (persepsi) terhadap ide atau peristiwa tertentu.
3. memperlemah atau meruntuhkan pemerintah asing atau kebijaksanaannya serta program nasional mereka yang kurang bersahabat.
4. menetralisasi atau menghancurkan propaganda tidak bersahabat dari negara lain atau kelompok lain

Dalam propaganda terdapat berbagai teknik untuk menyampaikan pesan dan untuk mencapai sebuah tujuan. Diantaranya adalah teknik dari Hummel dan Huntress<sup>19</sup>,

---

<sup>17</sup> S.L.Roy, *Diplomacy*, terjemahan Harwanto Dahlan dan Mirsawati, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal 48

<sup>18</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung, Putra A Bardin, 1999, hal 67

menurut mereka berdua, terdapat 16 teknik untuk menyampaikan isi propaganda. Dari 16 teknik tersebut, terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh Iran dalam menangani insiden ini. Teknik tersebut antara lain adalah ;

1. *Just Plain Lies* artinya dalam suatu kegiatan pengaruh mempengaruhi di kehidupan manusia yang serba sulit ini, seringkali terjadi berbagai peristiwa yang sukar diketahui asal mulanya secara pasti, oleh karena pengamatan dan penyaksian setempat tidak selalu mungkin untuk dilakukan. Umumnya berbagai peristiwa yang bersifat kontroversial seringkali diselubungi oleh prasangka dan berbagai macam kepentingan sehingga pandangan orang jauh dari fakta yang sebenarnya. Dalam keadaan demikian, kebohongan akan dianggap sama saja dengan kejujuran.
2. *Satire* adalah semacam lelucon, tapi mengandung ironi (mencemooh) dan sarcasme (ejekan), suatu pernyataan yang menyakiti hati, satire biasanya mengandung ejekan-ejekan mengenai kepincangan-kepincangan dalam masyarakat.
3. *Argumentum ad Populum* istilah ini berarti pengajuan argumentasi yang diperkirakan dapat menyenangkan hati orang banyak/rakyat dengan kata-kata yang bersifat “*flattering*” (merayu) atau “*soft soap*” Cara ini berlaku pula sampai tingkat menepuk-nepuk bahu rakyat biasa.
4. *Effective Language / Glittering Generailties* penggunaannya adalah untuk maksud menjunjung atau merendahkan sesuatu. Dalam setiap bahasa ada saja kata-kata yang bersifat efektif secara psikologis membawa pengaruh kepada

---

<sup>19</sup> Santoso Sastropoetro, Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa, Unpad, Bandung, 1991 hal 180-186

jalan pikiran seseorang. Jika bersifat positif dinamakan dengan *glittering generalities*. Dalam teknik ini, biasanya sanjungan-sanjungan agung digunakan.

Teknik-teknik propaganda ini menjadi alat diplomasi Iran dalam menanggapi pencitraan yang negatif yang selama ini dilekatkan oleh pihak Barat khususnya Amerika Serikat. Pengembangan program nuklir Iran yang menurut barat digunakan oleh Iran untuk membuat senjata pemusnah massal, dan dimasukkannya Iran sebagai negara Poros Setan bersama dengan Irak (Saddam Hussein) dan Korea Utara oleh Amerika Serikat (AS) merupakan propaganda yang terus dilancarkan oleh AS. Isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, terorrisme, dan lain sebagainya menjadikan stigma negatif bagi Iran yang diidentikkan dengan negara yang suka berkonfrontatif. Oleh karena itu Iran perlu menyerang balik propaganda tersebut agar mendapatkan citra yang positif di mata dunia internasional.

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka dasar pemikiran yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik hipotesa sebagai berikut;

1. Kepentingan Iran pada insiden Shatt Al-Arab tahun 2007 dengan menahan 15 tentara Inggris merupakan usaha Iran untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya
2. Usaha diplomasi Iran dalam menyelesaikan insiden Shatt Al-Arab dengan membebaskan para tahanan tentara 15 tentara Inggris merupakan usaha Iran untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat internasional dan membebaskan warganya yang ditahan Amerika Serikat.

3. Penayangan pengakuan dan surat dari tentara Inggris yang ditahan oleh merupakan alat propaganda Iran untuk memberikan kesan negatif kepada negara Inggris.

### **G. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan dalam skripsi ini yaitu dimulai dari peristiwa penahanan terhadap Kapal HMS Cornwall beserta awaknya, 15 pelaut Inggris pada tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan pembebasannya pada tanggal 4 April 2007, namun tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menulis peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah ini meskipun berada diluar masa penahanan ke-15 pelaut tersebut.

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan acuan bagi peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskripsi kualitatif, artinya analisa hanya sebatas deskripsi atas fakta-fakta maupun data yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan metodologi pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, seperti buku-buku ilmiah, majalah, koran, jurnal, “*website*” internet serta referensi-referensi yang didapat oleh penulis.

### **I. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan hal-hal yang bersifat normatif yang sesuai dengan aturan penulisan skripsi. Dalam bab ini berisikan tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok

Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II. DINAMIKA KONFLIK PERBATASAN DI SHATT AL-ARAB.**

Pada Bab ini penulis menjelaskan profil negara Iran, wilayah perairan Shatt Al-Arab dan latar belakang konflik akibat sengketa perbatasan Shatt Al-Arab, dari konflik Iran dengan Irak hingga konflik Iran dengan Inggris. Bab ini juga menjelaskan perjanjian mengenai perbatasan Shatt Al-Arab.

## **BAB III. INSIDEN SHATT AL-ARAB 2007.**

Bab ini menjelaskan keberadaan dan tugas pasukan Inggris di wilayah ini kemudian bab ini menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam insiden Shatt Al-Arab tahun 2007 yaitu tentang penangkapan tentara Inggris oleh Iran, penayangan tentara Inggris yang ditahan, kemudian pembebasannya. Dalam bab ini juga menjelaskan klaim serta sikap dan tanggapan dari masing-masing pihak selain itu dalam bab ini dijelaskan sikap dan tanggapan dari organisasi dan masyarakat internasional serta sekutu Inggris Tanggapan dan sikap dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa atas insiden ini

## **BAB IV. KEPENTINGAN IRAN PADA INSIDEN SHATT AL-ARAB**

### **TAHUN 2007**

Dalam bab ini dijelaskan faktor-faktor pemicu ketegangan insiden ini. Dalam bab ini juga dijelaskan apa saja kepentingan Iran dalam insiden ini. Bab ini juga menjelaskan dampak yang dipeoleh Iran dari insiden Shatt Al-Arab 2007

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini